STRATEGI MANAJEMEN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (UPT P2SKP) PONDOKDADAP SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ILHAMSYAH

135080201111111

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG

2018

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

STRATEGI MANAJEMEN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (UPT P2SKP) PONDOKDADAP SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Oleh:

MUHAMMAD ILHAMSYAH

135080201111111

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG

2018

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SKRIPSI

STRATEGI MANAJEMEN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (UPT P2SKP) PONDOKDADAP SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

Oleh:

MUHAMMAD ILHAMSYAH
135080201111111

Telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 6 Desember 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Ir. Darmawan Ockto Sutjipto, M.Si	Arief Setyanto, S.Pi, M.App.Sc
NIP. 19601028 198603 1 005	NIP. 19710904 199903 1 001
Tanggal : 17 DEC 2018	Tanggal : 17 DEC 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan PSPK

Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi, MT
NIP. 19780717200 502 1 004
Tanggal : 17 DEC 2018

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Judul: **STRATEGI MANAJEMEN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (UPT P2SKP) PONDOKDADAP SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ILHAMSYAH
NIM : 135080201111111
Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

PENGUJI PEMBIMBING:
Pembimbing 1 : Dr. Ir. Darmawan Ockto Sutjipto, M.Si
Pembimbing 2 : Arief Setyanto, S.Pi., M.App.Sc

PENGUJI BUKAN PEMBIMBING:
Dosen Penguji 1 : Ir. Sukandar, MP
Dosen Penguji 2 : Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi, MT
Tanggal Ujian : 6 Desember 2018

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai hukuman yang berlaku di Indonesia.

Malang, November 2018

Muhammad Ilhamsyah

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Muhammad Ilhamsyah merupakan nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Agus Eko Winarno dan Ibu Afridayanti sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis lahir di Tangerang, tanggal 17 November 1995. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD MI Al-Istiqomah pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 9 Kota Tangerang yang diselesaikan pada tahun 2010, selanjutnya menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 11 Kota Tangerang pada tahun 2013, dan akhirnya menempuh studi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Universitas Brawijaya

Motivasi yang tinggi dan do'a serta dukungan dari berbagai pihak, penulis telah menyelesaikan tugas akhir skripsi. Semoga dengan adanya penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan syukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Strategi Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT P2SKP) Pondokdadap Sendangbiru Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas karunia dan kesehatan yang diberikan selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr.Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi, MT selaku Ketua Jurusan.
3. Bapak Dr.Ir. Darmawan Ockto Sutjipto, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1.
4. Bapak Arief Setyanto, S.Pi, M.App.Sc selaku Dosen Pembimbing 2.
5. Bapar Sunardi, ST, MT selaku Ketua Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang.
7. Kedua Orang Tua saya yang tercinta, Bapak Agus Eko Winarno dan Ibu Afridayanti yang selalu memberikan dorongan semangat, nasihat dan doanya.
8. Muh. Ichsan Budianto, S.Pi, MT selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT P2SKP) Pondokdadap yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Bu Jum dan Pak Pur selaku pemilik Warung Brawijaya yang telah memperlakukan saya dengan baik selama kegiatan penelitian.
10. Terimakasih secara khusus disampaikan kepada keluarga MATAR (Lia, Lala, Zaid, Satrio Babeh, Zibo, Adhan, Dito, Hani, Nisa Bocil, Rino, Syifa Mamah, Dessie, Nelwan) yang selalu membantu saya serta selalu memberikan semangat dan support dalam proses penyelesaian laporan Skripsi ini.

11. Terimakasih secara khusus juga disampaikan kepada AyuKS, Ovian, Tia Dini, Bang wichak, Fikri, Alyssa, Radhin, Sima yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian laporan Skripsi ini.
12. Kontrakan POHARIN yang telah memberikan situasi kenyamanan untuk mengerjakan skripsi hingga selesai
13. Keluarga Pergerakan 2013 yang selalu setia menemani dalam setiap langkah, semangat dan proses-proses yang dihadapi selama perkuliahan sampai dengan proses Skripsi ini.
14. Ekstrak Manggis yang selalu memberikan semangat serta support kepada saya untuk menyelesaikan laporan Skripsi ini.
15. Keluarga B-WIN Squad (Dito, Zaid, Rajif, Faisal).
16. Keluarga besar FAD PSP 2013 yang telah membantu selama kegiatan penelitian.

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

MUHAMMAD ILHAMSYAH, Strategi Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT P2SKP) Pondokdadap Sendangbiru Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Darmawan Ockto Sutjipto, M.Si** dan **Arief Setyanto, S.Pi., M.App.Sc**)

Seiring dengan peralihan status UPT P2SKP Pondokdadap seharusnya dapat meningkatkan kinerja UPT P2SKP Pondokdadap lebih optimal sebagai bidang pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan tangkap. Salah satu yang menunjang hal tersebut yaitu ketersediannya sarana dan prasarana yang memadai untuk aktifitas yang lebih maksimal. Keterbatasan fasilitas yang tersedia di UPT P2SKP Pondokdadap seperti terdapat kendala dalam pembangunan sarana dan prasarana. Strategi manajemen diperlukan agar UPT P2SKP Pondokdadap dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi UPT P2SKP Pondokdadap, menentukan strategi manajemen UPT P2SKP Pondokdadap dan merumuskan arahan kebijakan yang tepat untuk manajemen UPT P2SKP Pondokdadap.

Kondisi dan permasalahan yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap adalah produk hukum atau MOU tentang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (1.200 m^2/TPI antara pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dan pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tidak ada, kejelasan status tanah dimana status tanah Pelabuhan Perikanan Pondokdadap sangatlah lemah secara administrasi, adanya intervensi dari pemerintah Desa Tambakrejo dimana kebijakan Pemerintah Desa Tambakrejo masuk ke dalam kebijakan penataan Pelabuhan Perikanan yang dilakukan Kepala UPT P2SKP Pondokdadap maupun DInas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sehingga terjadi benturan pengaturan pengelolaan Pelabuhan Perikanan, kurangnya komunikasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang untuk kemajuan Pelabuhan Perikanan Pondokdadap baik ke UPT P2SKP Pondokdadap maupun Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis SWOT menunjukan bahwa rumusan strategi manajemen yang harus dilakukan oleh UPT P2SKP Pondokdadap adalah strategi S-O (*Strength-Opportunity*). Strategi S-O merupakan strategi yang menggambarkan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap untuk mendapatkan peluang yang sebesar-besarnya. Strategi S-O disini yaitu menjaga kualitas mutu ikan agar nilai ekonomi ikan semakin tinggi sehingga dapat menarik investor, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan usaha perikanan yang didukung dengan adanya fasilitas pelabuhan sehingga dapat membuka kesempatan peluang kerja, menambah petugas atau tenaga kerja, menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut. Arahan kebijakan yang diprioritaskan untuk manajemen UPT P2SKP Pondokdadap berdasarkan analisis AHP adalah menjaga kualitas dan mutu ikan agar nilai ekonomi ikan semakin tinggi sehingga dapat menarik investor (35,7%), menciptakan pusat-pusat pertumbuhan usaha perikanan yang didukung dengan adanya fasilitas pelabuhan sehingga dapat membuka kesempatan peluang kerja (26,9%), menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut (20,6%), menambah petugas atau tenaga kerja (16,8%), sedangkan pihak yang berprioritas untuk pelabuhan yaitu pemerintah (44,3%), masyarakat (38,7%), dan swasta (16,9%).

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

KATA PENGANTAR

Penulis menyajikan laporan penelitian yang berjudul "Strategi Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT P2SKP) Pondokdadap, Sendangbiru, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur" sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Di bawah bimbingan:

1. Dr. Ir. Darmawan Ockto Sutjipto, M.Si
2. Arief Setyanto, S.Pi., M.App.Sc

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, November 2018

Muhammad Ilhamsyah

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

UCAPAN TERIMAKASIH iv

RINGKASAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

1. PENDAHULUAN 1
   1.1 Latar Belakang 1
   1.2 Rumusan Masalah 2
   1.3 Tujuan Penelitian 3
   1.4 Manfaat Penelitian 3
   1.5 Jadwal Pelaksanaan 3

2. TINJAUAN PUSTAKA 4
   2.1 Pengertian Pelabuhan Perikanan 4
   2.2 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 4
   2.3 Fungsi Pelabuhan Perikanan 7
   2.4 Fasilitas Pelabuhan 7
      2.4.1 Fasilitas Pokok 8
      2.4.2 Fasilitas Fungsional 8
      2.4.3 Fasilitas Penunjang 9
   2.5 Manajemen Strategi 10
      2.5.1 Pengertian Manajemen Strategi 10
      2.5.2 Proses Manajemen Strategi 10
      2.5.3 Manfaat Manajemen Strategi 11
   2.6 *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) 12
   2.7 *Analytical Hierarchy Process* (AHP) 13

3. METODE PENELITIAN 15
   3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 15
   3.2 Metode Penelitian 15
   3.3 Metode Pengumpulan Data 15
      3.3.1 Data Primer 15
      3.3.2 Data Sekunder 16
   3.4 Metode Penentuan Responden 16
   3.5 Analisis Data 17
      3.5.1 Analisis SWOT 17
      3.5.2 Analytical Hierarcy Process (AHP) 23

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 26
   4.1 Keadaan Umum UPT P2SKP Pondokdadap 26

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4.1.1 Letak Geografis UPT P2SKP Pondokdadap 26
4.1.2 Profil UPT P2SKP Pondokdadap 27
4.1.3 Struktur Organisasi UPT P2SKP Pondokdadap 29
4.2 Fasilitas Pokok, Fungsional dan Penunjang 34
4.2.1 Fasilitas Pokok 34
4.2.2 Fasilitas Fungsional 34
4.2.3 Fasilitas Penunjang 36
4.3 Operasional Pelabuhan 36
4.3.1 Armada Perikanan Tangkap 36
4.3.2 Produksi dan Pendaratan Ikan 37
4.4 Kondisi dan Permasalahan di UPT P2SKP Pondokdadap 38
4.4.1 Penyelesaian Masalah 39
4.5 Analisis SWOT 40
4.5.1 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal 40
4.5.2 Matriks SWOT 46
4.5.3 Analisis Matriks Grand Strategi 48
4.6 Analisis AHP (*Analitycal Hierarchy Process*) 51
4.6.1 Hubungan Aktor dengan Tujuan Utama 52
4.6.2 Hubungan Faktor dengan Aktor 53
4.6.3 Analisis Kebijakan AHP 54

5. KESIMPULAN DAN SARAN 58
5.1 Kesimpulan 58
5.2 Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN 62

repository.ub.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Tujuan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis dan output ... 17
2. Matriks IFAS ... 21
3. Matriks EFAS ... 21
4. Matriks SWOT ... 22
5. Skala Perbandingan Tingkat Kepentingan ... 24
6. Matriks pembandingan yang di normalisasi ... 25
7. Ratio Indeks (RI) yang umum digunakan untuk setiap ordo matriks ... 25
8. Fasilitas Pokok UPT P2SKP Pondokdadap ... 34
9. Fasilitas Fungsional UPT P2SKP Pondokdadap ... 35
10. Fasilitas Penunjang UPT P2SKP Pondokdadap ... 36
11. Armada Perikanan Tangkap UPT P2SKP Pondokdadap ... 37
12. Produksi dan Nilai Produksi Ikan Tahun 2017 ... 38
13. Matriks SWOT ... 47
14. Analisis Skoring Faktor Internal ... 48
T15. Analisis Skoring Faktor Eksternal ... 49
16. Nilai Hubungan Faktor dengan Aktor ... 53

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Lokasi Penelitian 26

2. Struktur Organisasi UPT P2SKP Pondokdadap 29

3. Matriks Grand Strategi 50

4. Analisis Aktor dalam Mencapai Tujuan 52

5. Hasil Analisis Sensitivitas (Aktor dan Faktor) 57

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Matriks IFAS dan Matriks EFAS 62

2. Kuisioner SWOT 63

3. Perhitungan Analisis SWOT 70

4. Kuisioner AHP 78

5. Analisis Hierarki Menggunakan Software *Expert Choise* 11 88

6. Dokumentasi 91

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.8/MEN/2012 menyatakan pelabuhan perikanan merupakan tempat terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Peningkatan infrastruktur perikanan bisa dilakukan dengan pembangunan pelabuhan perikanan yang merupakan bagian dari sistem perikanan tangkap. Aktivitas perikanan akan lebih teratur dan terarah karena adanya pelabuhan perikanan. Selain menyediakan fasilitas untuk aktivitas pendaratan, pengolahan, dan pendistribusian hasil tangkapan ikan, pelabuhan perikanan juga memberikan pelayanan yang optimal terhadap nelayan sebagai pengguna fasilitas yang tersedia di pelabuhan (Atharis, 2008).

Salah satu pelabuhan perikanan Jawa Timur yang masih diperlukan pengembangan pelabuhan yaitu Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT P2SKP) Pondokdadap. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12/MEN/2004, menyatakan tentang peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pondokdadap menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2016, PPP Pondokdadap telah beralih status menjadi UPT P2SKP Pondokdadap, Sendangbiru, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Seiring dengan peralihan status UPT P2SKP Pondokdadap seharusnya dapat meningkatkan kinerja UPT P2SKP Pondokdadap lebih optimal sebagai bidang pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan tangkap. Salah satu yang menunjang hal tersebut yaitu ketersediannya sarana dan prasarana yang memadai untuk aktivitas yang lebih maksimal. Keterbatasan fasilitas yang tersedia di UPT P2SKP Pondokdadap seperti terdapat kendala dalam pembangunan sarana dan prasarana. Strategi manajemen diperlukan agar UPT P2SKP Pondokdadap dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian di UPT P2SKP Pondokdadap mengenai strategi manajemen UPT P2SKP Pondokdadap.

1.2 Rumusan Masalah

UPT P2SKP Pondokdadap memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang perkembangan perikanan tangkap, karena pelabuhan tersebut merupakan salah satu basis kegiatan perikanan tangkap yang ada di Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi masih ada keterbatasan fasilitas seperti terdapat kendala dalam pembangunan sarana dan prasarana. Diharapkan dengan meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan akan memberikan manfaat dan meningkatkan aktivitas perikanan tangkap di UPT P2SKP Pondokdadap. Untuk itu perlu diadakan suatu penelitian tentang strategi manajemen UPT P2SKP Pondokdadap Sendangbiru Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dimana dalam penelitian yang menjadi fokus peneliti adalah:

1. Bagaimana kondisi dan permasalahan yang dihadapi UPT P2SKP Pondokdadap?
2. Bagaimana strategi yang tepat dalam perencanaan manajemen UPT P2SKP Pondokdadap?

3. Bagaimana arahan kebijakan yang tepat dalam perencanaan manajemen UPT P2SKP Pondokdadap?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksananya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi UPT P2SKP Pondokdadap
2. Menentukan strategi manajemen UPT P2SKP Pondokdadap
3. Merumuskan arahan kebijakan yang tepat untuk manajemen UPT P2SKP Pondokdadap

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai:

1. Bagi Mahasiswa

   Sebagai bahan referensi dan informasi tentang peran dan strategi manajemen UPT P2SKP Pondokdadap secara umum.
2. Bagi Instansi

   Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan usaha di bidang perikanan.
3. Bagi Masyarakat

   Sebagai bahan informasi dalam memanfaatkan UPT P2SKP dengan baik.

1.5 Jadwal Pelaksanaan

Penelitian ini akan dilaksanakan di UPT P2SKP Pondokdadap Sendangbiru Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur pada bulan Maret - April 2018

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari atas daratan dan perairan yang disekitarnya terdapat batasan-batasan tertentu sebagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan. Pelabuhan perikanan digunakan sebagai tempat kapal perikanan yang bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan adanya fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan. Dengan demikian pelabuhan perikanan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang khususnya berada di sekitar pelabuhan perikanan (Zakiyah, 2008).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 menyatakan pelabuhan perikanan adalah tempat terdiri atas daratan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal yang bersandar, berlabuh dan bongkar muat yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

2.2 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Klasifikasi pelabuhan perikanan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan menyatakan bahwa klasifikasi pelabuhan perikanan dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS).
    - Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas;

- Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT;
- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalam kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
- Mampu menampung kapal sekurang-kurangnya 100 unit;
- Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha;
- Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
- Terdapat aktifitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari; dan
- Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
   - Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
   - Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT;
   - Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
   - Mampu menampung kapal sekurang-kurangnya 75 unit;
   - Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha;
   - Terdapat aktifitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton perhari; dan
   - Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
   - Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;

- Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalam kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
- Mampu menampung kapal sekurang-kurangnya 30 unit;
- Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha;
- Terdapat aktifitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari; dan
- Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
    - Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan indoensia;
    - Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
    - Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
    - Mampu menampung kapal sekurang-kurangnya 15 unit;
    - Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.

Klasifikasi pelabuhan perikanan dibagi menjadi empat bagian, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pembagian klasifikasi tersebut didasarkan atas ketersedian fasilitas. Ketersediaan fasilitas yang ada di pelabuhan sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang akan diberikan oleh pelabuhan tersebut. Semakin besar kemampuan fasilitas untuk memberikan pelayanan maka akan berpengaruh terhadap tinggi kelas pelabuhan (Muljono, 2005).

2.3 Fungsi Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, menyatakan fungsi pelabuhan perikanan sebagai pemerintahan yaitu pelabuhan memiliki peran untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan. Fungsi pelabuhan sebagai pengusahaan yaitu pelabuhan perikanan dapat melakukan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait pelabuhan perikanan.

Fungsi dari pelabuhan perikanan antara lain pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan, bongkar muat, pembinaan mutu dan pengolahan, pemasaran dan distribusi ikan, pengumpulan data tangkapan dan hasil tangkapan, pengendalian lingkungan dan lain-lain. Salah satu fungsi penting dari suatu pelabuhan perikanan adalah pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan serta pengembangan industri perikanan, yaitu mendukung aktivitas yang ada di pelabuhan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran (Hutapea, 2017)

2.4 Fasilitas Pelabuhan

Pelaksanaan fungsi dan peranannya, pelabuhan perikanan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di pelabuhan perikanan umumnya terdiri dari fasilitas pokok, fungsional dan tambahan/penunjang. Fasilitas pokok dan penunjang bersifat pelayanan umum bagi masyarakat, dimana pembangunannya membutuhkan biaya yang relatif mahal maka menjadi kewajiban pemerintah. Fasilitas fungsional (*cold storage*, pabrik es, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lain-lain) yang bersifat komersial pembangunannya dapat

diserahkan kepada swasta sebagai mitra kerja di bawah bimbingan, pembinaan dan pengaturan oleh pemerintah (Ningsih, 2006)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, pelabuhan perikanan dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan memiliki 3 fasilitas. Fasilitas pelabuhan perikanan tersebut yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

2.4.1 Fasilitas Pokok

Fasilitas di pelabuhan perikanan sangat penting peranannya untuk mengoptimalkan pelayanan terkait segala kegiatan yang ada di pelabuhan. Fasilitas yang wajib di miliki oleh pelabuhan adalah fasilitas pokok. Fasilitas pokok sendiri merupakan fasilitas dasar atau utama yang diperlukan dalam melakukan aktifitas perikanan di pelabuhan. Fasilitas ini berfungsi untuk menjamin keamanan dan kelancaran kapal sewaktu berlayar, keluar masuk maupun hendak tambat labuh di area pelabuhan (Ginting, 2011).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, menyatakan fasilitas pokok pelabuhan perikanan terdiri dari: penahan gelombang (*break water*), turap (*revetment*), dan *groin*; Dermaga; *Jetty*; Kolam pelabuhan; Alur pelayaran; Jalan komplek dan *drainase*; dan lahan.

2.4.2 Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional dikatakan juga sebagai suprastruktur pelabuhan yaitu fasilitas yang berfungsi untuk meningkatkan nilai guna dari fasilitas pokok dengan cara memberikan pelayanan yang dapat menunjang kegiatan operasional yang ada di pelabuhan perikanan. Fasilitas ini tidak harus ada di suatu pelabuhan

perikanan, namun fasilitas ini disediakan sesuai dengan kebutuhan operasional perikanan tersebut (Atharis, 2008).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, menyatakan fasilitas fungsional pelabuhan perikanan terdiri dari:

1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
2. Navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan Menara pengawas;
3. Air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan instalasi listrik;
4. Tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti *dock/slipway*/ bengkel dan tempat perbaikan jaring;
5. Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti *transit sheed* dan laboratorium pembinaan mutu;
6. Perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan;
7. Transportasi seperti alat-alat angkut ikan;
8. Kebersihan dan pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan
9. Pengamanan kawasan seperti pagar kawasan.

2.4.3 Fasilitas Penunjang

Kresnanto (2004) menyatakan Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan peranan pelabuhan atau antara para pelaku mendapatkan kenyamanan melakukan aktifitas di pelabuhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, menyatakan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan

teridiri dari: BPN; *Mess* operator; wisma nelayan; fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK); pertokoan dan pos jaga.

2.5 Manajemen Strategi

2.5.1 Pengertian Manajemen Strategi

Manajemen strategi didefinisikan sebagai kombinasi antara seni dan ilmu dalam hal formulasi, implementasi dan evaluasi keputusan – keputusan lintas fungsi, yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya di masa akan datang. Secara tidak langsung definisi manajemen strategi yaitu menyatukan atau menggabungkan manajemen pemasaran, keuangan, produksi, penelitian dan pengembangan serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi. Tujuan manajemen strategi adalah tanggung jawab manajemen untuk mencapai hasil atau prestasi dalam waktu tertentu (Surjani, 2003).

2.5.2 Proses Manajemen Strategi

Proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap yakni perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Keputusan perumusan strategi mendorong suatu organisasi untuk komit pada produk, pasar, sumber daya, dan teknologi spesifik selama kurun waktu yang lama. Strategi menentukan keunggulan kompetitif jangka panjang dan keputusan strategis yang dihasilkan memiliki konsekuensi multifungsional yang luas dan berpengaruh besar terhadap suatu organisasi. Penerapan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Penerapan

strategi disebut tahap aksi dan merupakan tahap yang paling sulit karena membutuhkan disiplin, komitmen dan pengorbanan personal. Tahap terakhir adalah penilai strategi. Tiga aktifitas penilaian strategi yang mendasar adalah peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi yang sedang dijalankan, pengukuran kinerja, dan pengambilan langkah korektif (Putra, 2016).

2.5.3 Manfaat Manajemen Strategi

Taufiqurokhman (2016) menyatakan manajemen strategi memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Manajemen strategi setidaknya bisa mencegah terjadinya berbagai macam masalah di dalam ataupun diluar perusahaan dengan meningkatkan kemampuan suatu perusahaan di dalam menghadapi suatu masalah
2. Manajemen strategi bisa membuat kondisi atas penolakan terhadap suatu perubahan dapat berkurang
3. Manajemen strategi membuat perusahaan akan bisa melaksanakan seluruh operasionalnya secara lebih efesien dan efektif
4. Keterlibatan tenaga kerja atau karyawan perusahaan terhadap perumusan strategi bisa memperbaiki pengertian karyawan atas penghargaan sebuah produktivitas dalam tiap perencanaan strategi sehingga ujungnya bisa meningkatkan motivasi kerja dan rasa kebersamaan antar karyawan
5. Seluruh keputusan yang dijalankan oleh para manajer didalam perusahaan cenderung lebih tepat, hal ini didasarkan pada perencanaan yang sudah matang dan sudah memperhitungkan seluruh aspek yang terkait
6. Manajemen strategik akan membuat pihak manajemen perusahaan akan menjadi bertambah peka terhadap ancaman yang bisa datang dari luar lingkungan perusahaan

7. Kegiatan-kegiatan yang saling tumpeng tindih akan berkurang
8. Manajemen strategi dapat mengidentifikasi keunggulan komparatif perusahaan di dalam lingkungan yang makin beresiko
9. Manajemen strategi memberikan arah jangka panjang yang jelas nantinya yang akan dituju
10. Meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal

Juwono (2012) menyatakan manajemen strategi memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan dengan cepat dan tepat
2. Menjadi lebih peka dalam menjawab ancaman yang datang dari luar perusahaan
3. Membuat keputusan yang terbaik, hal ini dikarenakan interaksi kelompok mengumpulkan berbagai strategi yang lebih besar
4. Kerja sama dalam tim karyawan di dalam perumusan strategi akan dapat memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi dan dengan demikian dapat mempertinggi motivasi kerja mereka
5. Organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategi akan lebih menguntungkan (*Profitable*) dan lebih berhasil daripada yang tidak menerapkan konsep manajemen strategi.

2.6 *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT)

Analisis SWOT merupakan singkatan dari *Strengths*, *Weakness, Opportunity* dan *Threats*, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan ancaman yang ada pada perusahaan. Analisis SWOT ini juga sangat membantu perusahaan dalam

menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan yang bersifat sebagai strategi bagi perusahaan dalam mengarungi dunia bisnis. Adanya analisis SWOT, perusahaan akan bisa mengalahkan para pesaing karena mengetahui kekuatan yang dimiliki perusahaan dan mengetahui kelemahan yang masih ada di dalam perusahaan, selain itu juga dapat mendeteksi apa saja yang menjadi peluang bagi perusahaan dan adanya ancaman yang mungkin timbul (Sholihin, 2014).

Analisis SWOT mempertimbangkan faktor lingkungan internal kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal peluang dan ancaman yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) dengan faktor internal kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan strategi suatu perusahaan. Analisis SWOT didahului dengan identifikasi posisi perusahaan atau institusi melalui evaluasi nilai faktor internal dan evaluasi nilai faktor eksternal (Kresnanto, 2004).

2.7 *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Sharif (2015) menyatakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah suatu metode pengambilan keputusan sederhana dan fleksibel, menampung kreativitas dalam rancangannya terhadap suatu masalah. Model AHP pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, ahli matematika dari University of Pitsburgh, Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an. Analisis AHP ditunjukkan untuk membantu model permasalahan yang tidak terstruktur dan biasanya diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah terukur maupun masalah-masalah yang memerlukan pendapat (*judgement*).

AHP merupakan salah satu metode untuk membantu menyusun suatu prioritas dari berbagai pilihan dengan menggunakan beberapa kriteria (*multi criteria*). Karena sifatnya yang multi kriteria, AHP cukup banyak digunakan dalam

penyusunan prioritas. Sebagai contoh, untuk menyusun prioritas penelitian, pihak manajemen Lembaga penelitian sering menggunakan beberapa kriteria seperti dampak penelitian, biaya kemampuan SDM, dan juga mungkin waktu pelaksanaan (Susila dan Munadi, 2007)

3. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – April 2018, bertempat di UPT P2SKP Pondokdadap Sendangbiru Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Pengolahan data dilakukan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Malang.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif dengan cara *survey*. Menurut Subandi (2011), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan mengenai keadaan atau masalah yang ada yaitu sesuai apa adanya pada saat melakukan penelitian. Sehingga tujuan dari penelitian yang menggunakan metode deskriptif ini yaitu untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

Survey merupakan suatu metode pengumpulan data primer dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden individu. Adanya metode *survey* ini digunakan sebagai teknik penelitian yang melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala dan biasanya dalam melakukan penelitian dengan menyebarkan kuisoner atau wawancara, dan biasanya dilakukan dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif (Sutiyono, 2013).

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Teknik komunikasi langsung digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan kuisioner sebagai pedoman dalam melakukan

wawancara. Responden dipilih dari pegawai UPT P2SKP Pondokdadap dan nelayan yang berdasarkan pertimbangan oleh peneliti dengan anggapan responden telah memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki seperti mempunyai pengetahuan terkait dengan data-data yang akan dikumpulkan oleh peneliti.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari data primer berupa kajian literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka di UPT P2SKP Pondokdadap. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan statistik perikanan UPT P2SKP Pondokdadap pada tahun 2017 meliputi kondisi umum UPT P2SKP Pondokdadap, struktur organisasi UPT P2SKP Pondokdadap, armada perikanan tangkap, jumlah produksi dan nilai produksi dan lain-lain.

3.4 Metode Penentuan Responden

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu dimana responden dipilih secara sengaja untuk menentukan tujuan tertentu, dengan mengandalkan logika atas kaidah-kaidah yang berlaku yang didasari dengan tujuan peneliti (Fauzi, 2005).

Purposive sampling yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa jenis dan jumlah responden yang akan diambil pada saat penyebaran kuisioner telah mewakili dari tujuan penelitian. Pemilihan responden dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kelayakan suatu wilayah untuk dikembangkan lagi melalui peran aktif dari stakeholder. Pemilihan responden ini dilakukan dengan cara memilih secara langsung stakeholder yang menjadi sasaran responden. Untuk mendapatkan informasi dari para responden, maka perlu dibentuk suatu kuisoner

yang ditujukan kepada para responden, dimana responden terdiri dari pegawai dinas pelabuhan dan nelayan.

3.5 Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menentukan strategi manajemen yang akan diambil di UPT P2SKP Pondokdadap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu: *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT) dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Ketersediaan fasilitas di UPT P2SKP Pondokdadap dianalisis secara deskriptif. Tujuan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis dan output di kegiatan penelitian disajikan pada tabel 1

Tabel 1. Tujuan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis dan output

No.	Tujuan Penelitian	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis	Output
1.	Mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi UPT P2SKP Pondokdadap	1. Observasi 2. Wawancara 3. Studi Pustaka	Deskriptif	Kondisi dan permasalahan yang terjadi di UPT P2SKP Pondokdadap
2.	Menentukan strategi manajemen UPT P2SKP Pondokdadap	1. Observasi 2. Wawancara 3. Studi Pustaka 4. Kuisioner	SWOT	Strategi manajemen UPT P2SKP Pondokdadap
3.	Merumuskan arahan kebijakan yang tepat untuk manajemen UPT P2SKP Pondokdadap	1. Observasi 2. Wawancara 3. Studi Pustaka 4. Kuisioner	AHP	Arahan kebijakan yang tepat untuk manajemen UPT P2SKP Pondokdadap

3.5.1 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis berbagai faktor secara sistematis dalam menentukan strategi manajemen UPT P2SKP Pondokdadap. Rangkuti (2004) menyatakan SWOT merupakan singkatan dari lingkungan Internal

Strengths dan *Weaknesses* serta lingkungan Eksternal *Opportunities* dan *Threats* yang dihadapi di dalam dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*).

1. Identifikasi Faktor Internal

Menentukan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan serta kelemahan UPT P2SKP Pondokdadap yang nantinya akan berpengaruh terhadap UPT P2SKP Pondokdadap. Pemberian bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan pada setiap faktor dengan skala 1 = kurang penting sampai dengan 4 = sangat penting (digunakan untuk kuisioner pembobotan). Bobot IFAS didapat dari pembagian jumlah nilai yang didapat pada setiap faktor kekuatan/kelemahan dengan jumlah keseluruhan faktor kekuatan dan kelemahan, bobot IFAS ini akan digunakan untuk penentuan total skor yang didapat yang nantinya akan digunakan juga untuk menentukan Matriks Grand Strategi. Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1. Setelah penentuan bobot, penentuan rating pada kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (kuat) sampai dengan 1 (lemah). Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) mulai dari 1 sampai dengan 4 (sangat baik), sebaliknya jika kelemahan memberikan pengaruh sangat besar pada faktor kelemahan UPT P2SKP Pondokdadap nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan memberikan pengaruh sangat kecil nilainya adalah 4 (digunakan untuk kuisioner rating). Pada kolom skor merupakan perkalian bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4 (kuat) sampai dengan 1 (lemah). Nilai total skor ini menunjukkan bagaimana UPT P2SKP Pondokdadap bereaksi terhadap faktor-

faktor strategi eksternalnya, total skor ini akan digunakan untuk penentuan Matriks Grand Strategi. Matriks IFAS disajikan pada tabel 2.

2. Identifikasi faktor eksternal

Menentukan faktor eksternal peluang dan ancaman yang memungkinkan dapat memberikan dampak terhadap UPT P2SKP Pondokdadap. Pemberian bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak begitu penting). Bobot EFAS didapat dari pembagian jumlah nilai yang didapat pada setiap faktor peluang/ancaman dengan jumlah keseluruhan faktor peluang dan ancaman. Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1. Setelah penentuan bobot, penentuan rating pada kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (kuat) sampai dengan 1 (lemah). Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori peluang) mulai dari 1 sampai dengan 4 (sangat baik), sebaliknya jika ancaman memberikan dampak sangat besar pada faktor ancaman UPT P2SKP Pondokdadap nilainya adalah 1, sedangkan jika ancaman memberikan dampak sangat kecil nilainya adalah 4. Pada kolom skor merupakan perkalian bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4 (kuat) sampai dengan 1 (lemah). Nilai total skor ini menunjukan bagaimana UPT P2SKP Pondokdadap bereaksi terhadap faktor-faktor strategi internalnya. Matriks EFAS disajikan pada tabel 3.

3. Matriks SWOT

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matris SWOT. Langkah awal dalam analisis SWOT ini adalah merumuskan faktor internal (kekuatan-kelemahan) dan eksternal (peluang-ancaman) yang nantinya akan digunakan penulis untuk pembuatan kuisioner dan hasilnya akan diolah menggunakan bantuan *Microsoft excel*, setelah itu adalah penentuan

matriks SWOT, matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis yaitu: SO (*Strengths-Opportunities*), ST (*Strengths-Threats*), WO (*Weaknesses-Opportunities*) dan WT (*Weaknesses-Threats*). Matriks SWOT disajikan pada tabel 4.

4. Matriks Grand Strategi

Penyusunan matriks ini merupakan langkah akhir dalam metode analisis SWOT. Masalah yang sering dihadapi dalam penggunaan analisis SWOT ini adalah menentukan apa yang menjadi tujuan utama dalam pengembangan UPT P2SKP Pondokdadap, setelah menentukan faktor-faktor internal kekuatan-kelemahan dan eksternal peluang-ancaman, serta penentuan empat set strategi tujuan utama pengembangan UPT P2SKP Pondokdadap (SO, ST, WO, WT). Penentuan SO (Kuadran I) dibuat untuk memanfaatkan seluruh kekuatan dalam merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi ST (Kuadran II) adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki UPT P2SKP Pondokdadap untuk mengatasi ancaman. Strategi WO (Kuadran III) diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WT (Kuadran IV) didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif atau bertahan dan berusaha meminimalkan kelamahan yang ada serta menghindari ancaman. Penentuan posisi kuadran diperoleh dari selisih total skor faktor internal (kekuatan-kelemahan) dengan faktor eksternal (peluang-ancaman), hasil tersebut merupakan penentuan titik koordinat sumbu X (S-W) dan Y (O-T) dan penentuan posisi kuadran.

Tabel 2. Matriks IFAS

Faktor-Faktor Strategi Internal Kekuatan (S)	Bobot	Rating	Skor
1			
2			
3			
4			
5			
Faktor-Faktor Strategi Internal Kelemahan (W)	**Bobot**	**Rating**	**Skor**
1			
2			
3			
4			
5			
Total	**1**		

Tabel 3. Matriks EFAS

Faktor-Faktor Strategi Eksternal Peluang (O)	Bobot	Rating	Skor
1			
2			
3			
4			
5			
Faktor-Faktor Strategi Eksternal Ancaman (T)	**Bobot**	**Rating**	**Skor**
1			
2			
3			
4			
5			
Total	**1**		

Tabel 4. Matriks SWOT

Intern Factor (IFAS) / **Extern Factor (EFAS)**	**Strength (S)** Menentukan faktor peluang internal	**Weakness (W)** Menentukan kelemahan internal
Opportunities (O) Menentukan faktor peluang eksternal	**Strategi (SO)** Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	**Strategi (WO)** Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threaths (T) Menentukan faktor ancaman eksternal	**Strategi (ST)** Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	**Strategi (WT)** Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

- Strategi SO

  Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan yaitu dengan cara memanfaatkan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang sebesar-besarnya

- Strategi ST

  Strategi ini untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan dengan cara menghindari ancaman

- Strategi WO

  Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang eksternal yang ada

- Strategi WT

  Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif atau bertahan dengan cara meminimalkan kelemahan internal yang ada serta menghindari ancaman eksternal.

3.5.2 Analytical Hierarcy Process (AHP)

AHP adalah salah satu alat analisis dalam pengambilan keputusan yang baik dan fleksibel. Metode ini berdasarkan pada pengalaman dan penilaian dari pelaku atau pengambil keputusan. Metode yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty ini, digunakan terutama sekali untuk membantu mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dengan menetapkan prioritas dan membuat keputusan yang paling baik ketika aspek kualitatif dan kuantitatif dibutuhkan untuk dipertimbangkan (Wibowo *et al.,* 2012).

Menurut Fitriyani dan Helmud (2016), langkah-langkah metode AHP sebagai berikut:

a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
b. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama.
c. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat diatasnya.
d. Melakukan perbadingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan.
e. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya.
f. Mengulangi langkah c,d,f untuk (2-3) untuk seluruh tingkat hirarki.
g. Menghitung vector eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai mencapai tujuan.
h. Memeriksa konsistensi hirarki

AHP dianalisis dengan menetapkan skala kuantitatif 1 sampai 9 untuk menilai perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen terhadap elemen lainnya. Setelah

memberikan penilaian pada setiap perbandingan antar elemen, maka untuk mengetahui prioritasnya disusun matriks perbandingan berpasangan. Kemudian menguji konsistensi dan menganalisis kepekaan prioritas menyeluruh terhadap perubahan dalam perbandingan. Skala perbandingan tingkat kepentingan dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5. Skala Perbandingan Tingkat Kepentingan (Fitriyani dan Helmud, 2016)

Tingkat Kepentingan	Definisi	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya (*Equal Importance*)	Dua elemen mempunyai pengaruh sama besar
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari pada yang lainnya (*Slighty more importance*)	Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen
5	Elemen yang satu lebih penting dari pada yang lainnya (*Materially more importance)*	Pengalaman dan penilaian dengan kuat menyokong satu elemen dibanding elemen lainnya
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya (*Significantly more importance*)	Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam kenyataan
9	Satu elemen mutlak lebih penting dari elemen lainnya (*Absolutely more importance*)	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan	Nilai ini diberikan bila ada komponen diantara dua pilihan
Kebalikan/Resiprokal		Jika untuk aktivitas ke-i mendapat suatu angka bila dibandingkan dengan aktivitas ke-j, maka j mempunyai nilai kebalikan dengan i

Hamali (2015) Rasio konsistensi (*Consistency ratio, CR)* menunjukkan sejauh mana analisis konsisten dalam memberikan nilai pada matriks pembandingan. Secara umum, hasil analisis dianggap konsisten jika memiliki CR < 10%. Jika nilai CR > 10%, perlu dipertimbangkan untuk melakukan reevaluasi dalam penyusunan matriks pembandingan. Matriks perbandingan berpasangan

dibuat dengan cara membandingkan setlap pasang alternatif terhadap kriteria yang diuji. Matriks pembandingan yang dinormalisasi dapat dilihat pada tabel 6

Tabel 6. Matriks pembandingan yang di normalisasi

Kriteria / Alternatif	A	B	C
A		A/B	A/C
B	B/A		B/C
C	C/A	C/B	
Jumlah			

Tabel 7. Ratio Indeks (RI) yang umum digunakan untuk setiap ordo matriks

Urutan Matriks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0,00	0,00	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Sintesis bertujuan untuk memperoleh prioritas dari seluruh alternatif keputusan setelah semua data dalam matriks pembandingan dilakukan. Sintesis dilakukan dengan membuat normalisasi matriks pembandingan, yang diperoleh dengan membagi setiap entri dengan jumlah kolom pada entri yang bersangkutan. Jumlah setiap kolom akan menjadi sama dengan satu. Banyaknya cell yang harus diisi adalah n (n-1)/2 karena matris reciprocal elemen diagonalnya bernilai = 1, jadi tidak perlu diisi. Selanjutnya nilai setiap entri pada baris yang sama dirata-ratakan. Nilai rata-rata baris menunjukkan nilai prioritas relatif alternatif (baris) tersebut terhadap alternatif lainnya. Matriks yang dinormalisasi, kalikan nilai prioritas relatif dengan setiap entri pada kolom terkait dalam matriks pembandingan, setelah itu jumlahkan hasil perkalian dalam baris. Pada kolom jumlah baris, bagi setiap entrinya dengan entri yang sesuai dengan vector prioritas, hasilnya berupa vector konsistensi

Selanjutnya, dihitung CI (*Consistency Index*), setelah mendapatkan hasil CI dilanjutkan dengan menghitung CR (*Consistency Ratio).*

$$CI = \frac{\lambda - n}{n-1} \qquad CR = \frac{CI}{RI}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum UPT P2SKP Pondokdadap

4.1.1 Letak Geografis UPT P2SKP Pondokdadap

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT P2SKP) Pondokdadap, Sendangbiru, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini terletak di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. UPT P2SKP Pondokdadap berjarak sekitar ±78 km dari selatan Kota Malang. Adapun lokasi UPT P2SKP Pondokdadap dapat dilihat pada gambar 1. Secara geografis UPT P2SKP Pondokdadap terletak pada 8˚25’59” LS dan 112˚40’55” BT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Sitiarjo

Sebelah Timur : Desa Kedungbanteng

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Desa Sitiarjo

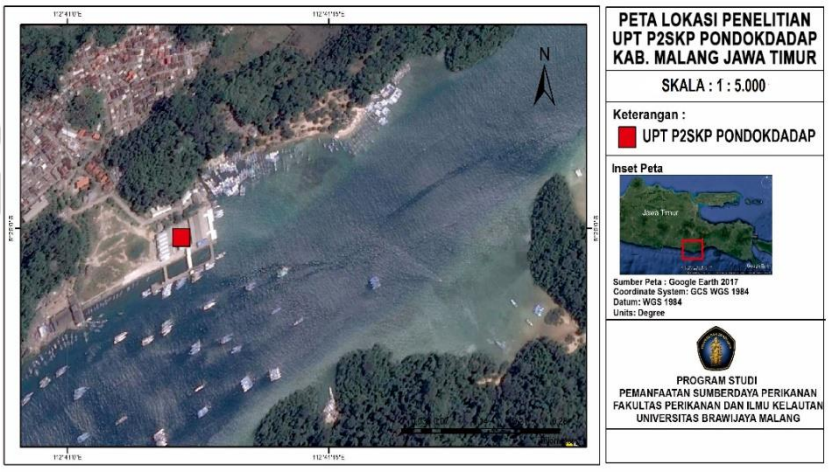

Gambar 1. Lokasi Penelitian

4.1.2 Profil UPT P2SKP Pondokdadap

Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap Malang merupakan Pelabuhan Perikanan yang unik dimana pelabuhannya dilindungi oleh *break water* alami yaitu pulau Sempu, sehingga bisa meredam ganasnya ombak Samudra Hindia. Dengan adanya perlindungan *break water* alami tersebut maka banyak kapal perikanan yang berlabuh di pelabuhan perikanan Pondokdadap Malang, di UPT P2SKP Pondokdadap. Adapun terdapat struktur organisasi dimana organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri dari bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi itu penting karena merupakan wadah atau tempat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang ada secara legal. UPT P2SKP Pondokdadap dibentuk Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 115 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas UPT di Lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. UPT P2SKP Pondokdadap adalah Unit Kerja yang dipimpin oleh kepala UPT.

Dalam peraturan Menteri tersebut diatas terklasifikasikan Pelabuhan Perikanan, diantaranya: Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pelabuhan Perikanan ditinjau dari UU No.17 tahun 2008 tentang pelayaran merupakan pelabuhan khusus karena diperuntukkan untuk kegiatan perikanan tangkap dan juga sebagai terminal bertemunya para pembeli ikan yang di darat dan nelayan atau pelaku penangkapan ikan di laut. Pada tahun 2014 Pelabuhan Perikanan ini menjadi Instalasi Pelabuhan Perikanan Pondokdadap (IPPP) dibawah UPT Pelabuhan Perikanan Tamperan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/11829/116.01/2014. Dan berubah menjadi UPT Pelabuhan dan

Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 115 Tahun 2016.

Dengan kondisi dan situasi tersebut, maka UPT P2SKP Pondokdadap memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

Menjadikan unit pelaksana teknis yang handal demi terjamin kelangsungan dan keberlanjutan produktivitas perikanan serta terjaminnya kedaulatan dan kelestarian dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat.

Misi:

Terjamin kelangsungan dan keberlanjutan produktivitas perikanan serta terjaminnya kedaulatan dan kelestarian dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dengan:

1) Pelayanan pemenuhan dokumen kapal dan jasa pelabuhan yang berbasis tertib administrasi
2) Pengelolaan dan pengawasan dalam upaya penertiban pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat
3) Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pulau-pulau kecil berbasis mitigasi bencana
4) Menjadikan unit pelaksana teknis *eco-fishingport* (Pelabuhan perikanan berbasis ekowisata)
5) Menjadikan petugas unit pelaksana teknis yang berintegrasi, kompeten dan professional yang berbasis sistem manajemen kerja

4.1.3 Struktur Organisasi UPT P2SKP Pondokdadap

Adapun struktur organisasi di UPT P2SKP Pondokdadap dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut:

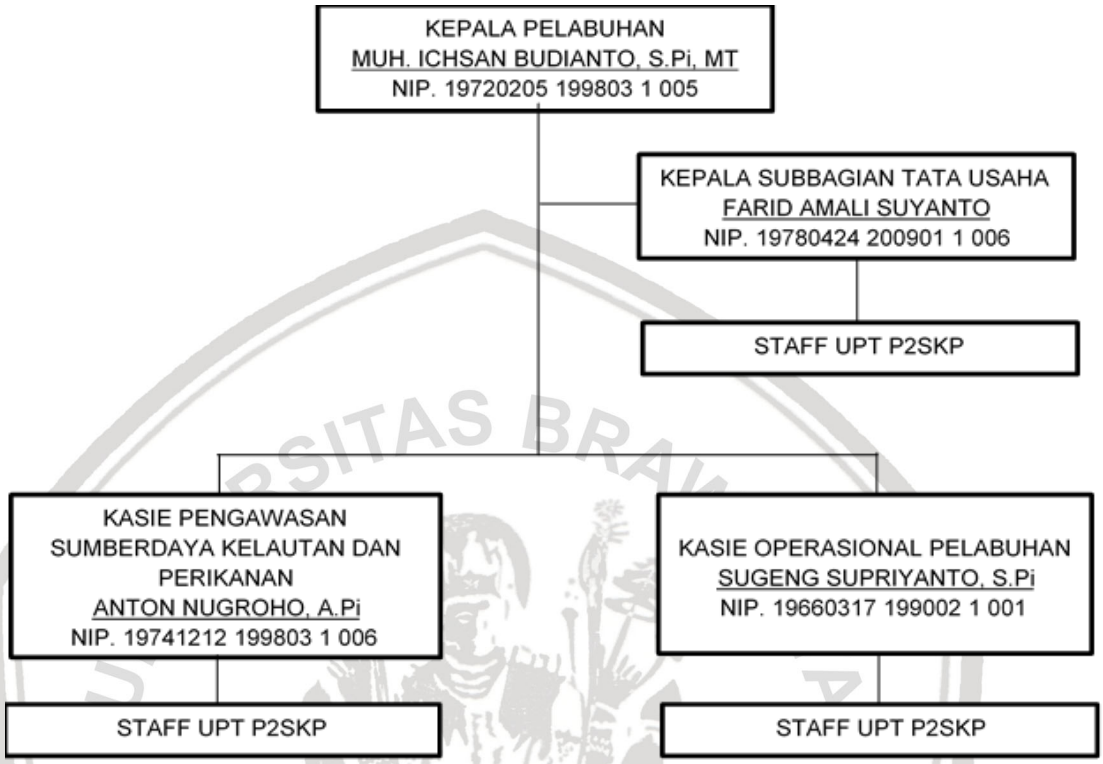

Gambar 2. Struktur Organisasi UPT P2SKP Pondokdadap

Struktur organisasi di UPT P2SKP Pondokdadap mempunyai sususan organisasi dan tugas, yaitu:

a. Kepala Pelabuhan:

1. Menyusun rencana dan program kerja UPT sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional sesuai visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;
2. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangan dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu;
3. Mengawasi dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerya yang tinggi;

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dengan cara memberi arahan, petunjuk dan perintah kepada masing-masing unit kerja di lingkungan UPT untuk kelancaran pelaksanaannya agar sesuai dan tepat sasaran;
5. Mengawasi dan mengarahkan proses pengelolaan administrasi keuangan pengadaan barang dan jasa serta administrasi kepegawaian dalam rangka akurasi pertanggung jawaban;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional Subbag Tata usaha dan Seksi untuk mengetahui tingkat perkembangan program kerja;
7. Memantau, mengarahkan dan mengendalikan pelayanan kesyahbandaran dan jasa pelabuhan perikanan serta pengelolaan sumberdaya kelautan;
8. Mengarahkan dan memantau kegiatan bimbingan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
9. Mengarahkan dan memantau kegiatan pemanfaatan, pemberdayaan dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
10. Meneliti, menyempurnakan dan menandatangani naskah-naskah dinas intern dan ekstern UPT untuk kelancaran tugas-tugas dinas;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas, program dan pencapaian hasil-hasil sebagai pertanggung jawaban kepada dinas;
12. Mengikuti dan atau memimpin rapat intern, ekstern sesuai dengan fungsi UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha:

1. Menyusun rencana operasional Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengevaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;

2. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memberi disposisi dan memantau agar penyelesaiannya tepat waktu;
3. Mengawasi dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas dengan cara memberikan bimbingan dan petunjuk agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
4. Mengarahkan surat, penggandaan dan tata kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengendalian informasi;
5. Meneliti dan menyempurnakan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan UPT guna tertib administrasi keuangan;
6. Meneliti dan menyempurnakan administrasi keuangan dan gaji pegawai di lingkungan UPT sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan;
7. Memberi petunjuk dan tata cara inventarisasi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor di lingkungan UPT dalam rangka tertib administrasi aset;
8. Membimbing dan memberi petunjuk pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan dan umum di lingkungan UPT untuk kelancaran tugas-tugas;
9. Memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan pelayanan kepelabuhanan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan kepada masyarakat yang membutuhkan;
10. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang ketatausahaan dalam menyebarkan disposisi pimpinan.

c. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan:

1. Menyusun rencana kerja dan skedul pelaksanaan tugas seksi sesuai dengan program kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu;
3. Mengawasi dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi;
4. Mengawasi pelayanan jasa tambat labuh bagi kapal-kapal nelayan yang berada di lingkungan pelabuhan perikanan milik UPT;
5. Mengawasi pelayanan jasa bongkar muat kapal yang akan tiba dari mencari ikan;
6. Memfasilitasi pelaksanaan perbaikan kapal yang rusak bukan dengan kesengajaan agar bisa dipergunakan untuk melaut kembali;
7. Memfasilitasi pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi pemilik kapal/nelayan untuk kepentingan melaut;
8. Memantau pemakaian lahan dan bangunan di lingkungan pelabuhan perikanan yang dipergunakan oleh para penyewa;
9. Mengelola sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pra dan pasca penangkapan ikan yang berada di lingkungan pelabuhan perikanan dan instalasi;
10. Menginventarisasi sarana prasarana di pelabuhan perikanan dan instalasi yang dipergunakan oleh para nelayan;
11. Mengkoordinasikan kegiatan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja di kawasan pelabuhan perikanan dan instalasi;
12. Melaksanakan pemeriksaan kondisi kapal untuk memastikan keamanan dan keselamatan kerja sebelum kapal melaut;

13. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

d. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan:

1. Menyusun rencana operasional seksi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memberi disposisi dan memantau agar penyelesaiannya tepat waktu;
3. Mengawasi dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas dengan cara memberi bimbingan dan petunjuk agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
4. Menyiapkan bahan kegiatan bimbingan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
5. Menyusun bahan dan laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan program;
6. Menyusun bahan pelaksanaan bimbingan pemanfaatan, pemberdayaan dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
7. Menyusun bahan dan laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan pemanfaatan, pemberdayaan dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

4.2 Fasilitas Pokok, Fungsional dan Penunjang

4.2.1 Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok yang dimiliki oleh UPT P2SKP Pondokdadap sudah sangat baik. Hal ini terbukti dari fasilitas pokok yang ada sudah terbilang baik dan memenuhi syarat pelabuhan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa fasilitas pokok pelabuhan terdiri atas penahan gelombang (*breakwater*), turap (*revetment*), dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran, fasilitas penghubung dan jalan komplek serta lahan. Fasilitas yang berada di UPT P2SKP Pondokdadap dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Fasilitas Pokok UPT P2SKP Pondokdadap

No	Nama Fasilitas	Ukuran	Keterangan
1	Tanah Lama	5 Ha	2,515 Ha SKPT 2,485 Ha belum SKPT
2	Tanah urugan / lahan baru	5,86 Ha	Baik
3	Turap / Plengsengan	1,900 m^2	Baik
4	Jalan Komplek (Lama)	300 m^2	Baik
5	Jalan ke TPI baru	1,600 m^2	Baik
6	Dermaga Pancang / Jetty	946 m^2	Baik, Panjang 290 m
7	Pengerukan Kolam Labuh	1,8 Ha	Baik
8	*Break Water* (Pulau Sempu)	877 Ha	Alami

Sumber: Laporan Tahunan UPT P2SKP Pondokdadap (2017)

4.2.2 Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang dapat meningkatkan guna dari fasilitas pokok. Keberadaan fasilitas fungsional yang ada di pelabuhan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan pelabuhan tersebut. Fasilitas fungsional yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Fasilitas Fungsional UPT P2SKP Pondokdadap

No	Nama Fasilitas	Ukuran	Keterangan
1	Gedung TPI (Lama)	720 m^2	Digunakan los ikan
2	Gedung TPI (Baru)	1.200 m^2	Baik
3	Area Parkir Lama	2.000 m^2	Rusak ringan
4	Gedung garam	60 m^2	Baik
5	Reservoir Air (Tandon Lama)	16 m^2	Baik
6	Reservoir Air (Tandon Baru)	20 m^2	Baik
7	Tangki solar dan dispenser	1 m^2	Rusak Berat
8	Gedung genset	60 m^2	Baik
9	Genset (65KVA)	2 unit	1 ringan dan 1 rusak berat
10	Gedung BAP	38 m^2	Baik
11	Gedung Bengkel (Lama)	60 m^2	Baik
12	Gedung Bengkel (Baru)	180 m^2	Baik (milik Pemkab Malang)
13	Balai Pertemuan Nelayan (Lama)	130 m^2	Baik
14	Balai Pertemuan Nelayan (Baru)	150 m^2	Baik (milik Pemkab Malang)
15	Gedung Kotak Ikan	182 m^2	Baik
16	Gedung Ice Storage	200 m^2	Baik
17	Gedung MCK (Lama)	60 m^2	Baik
18	Pager Keliling BRC	600 m	Rusak Berat
19	Radio SSB	1 unit	Baik
20	Gedung Pemindangan	450 m^2	3 unit Baik
21	Los Ikan Segar	84 m^2	Tidak Terpakai
22	Gedung MCK (Baru)	110 m^2	Baik
23	Gedung Gudang Es	3 unit	Baik
24	Gedung Pengepakan Ikan Baru	366 m^2	Baik
25	Gedung Pabrik Es mini	1 unit	Tidak Operasional
26	Gedung Genset	60 m^2	Baik
27	Cold Storage	200 m^2	Tidak Operasional
28	Mess Nelayan	8 unit	Baik
29	Gudang Es Baru	182 m^2	Baik
30	Area Parkir (Baru)	1972 m^2	Baik
31	Craine	4 unit	Baik
32	Gedung Transite Ikan	1 unit	Baik
33	Gedung Integrated Cold Storage (ICS)	1 unit	Baik
34	Tempat Perbaikan Jaring	1 unit	Baik
35	Gedung Lapak Ikan Segar	1 unit	Baik
36	Gedung TPI Hygiene	1 unit	Baik
37	Gedung Poskamladu	1 unit	Baik
38	Bengkel Kapal	1 unit	Baik
39	Mushola	100 m^2	Baik

Sumber: Laporan Tahunan UPT P2SKP Pondokdadap (2017)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4.2.3 Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang dapat meningkatkan fungsi dari fasilitas pokok serta fasilitas penunjang yang ada di pelabuhan dan meningkatkan kenyamanan bagi para pelaku kegiatan yang ada di pelabuhan. Fasilitas penunjang yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Fasilitas Penunjang UPT P2SKP Pondokdadap

No	Nama Fasilitas	Ukuran	Keterangan
1	Gedung kantor administrasi pelabuhan perikanan	329,5 m^2	Baik
2	Rumah Tamu type 150	225 m^2	Baik
3	Rumah Tinggal type 120	126 m^2	Baik
4	Rumah Tinggal type 70	95 m^2	Baik
5	Pos Keamanan	2 unit	Baik
6	Asrama nelayan	8 unit	Baik
7	Rumah Direksikit type 45	1 unit	Baik

Sumber: Laporan Tahunan UPT P2SKP Pondokdadap (2017)

4.3 Operasional Pelabuhan

4.3.1 Armada Perikanan Tangkap

Kapal penangkap ikan yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap merupakan kapal perikanan yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan. Satuan tonase kotor kapal disebut dengan *Gross Tonage* (GT). Jumlah kapal penangkap ikan yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap pada tahun 2017 adalah unit dengan ukuran kapal < 5 GT 145 unit, 6-10 GT 23 unit, 11<20 GT 380 unit, 21-30 GT 2 unit, dan > 30 GT 2 unit. Kapal yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Kapal Motor (KM), Perahu/Kapal Motor Tempel (KMT) dan Perahu Tanpa Motor (PTM) dengan ukuran yang berbeda berkisar antara 1-30 GT. Armada perikanan tangkap dapat dilihat pada tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Armada Perikanan Tangkap UPT P2SKP Pondokdadap

Alat Tangkap / Ukuran	Pancing Tonda		Pancing ulur jukung	Pancing ulur kunting	Purse Seine	Jumlah
	Lokal	Andon				
< 5 GT	0	0	98	47	0	145
6-10 GT	23	0	0	0	0	23
11-20 GT	223	101	0	0	56	380
21-30 GT	0	0	0	0	2	2
> 30 GT	0	0	0	0	2	2
Jumlah	246	101	98	47	60	552

Sumber: Laporan Tahunan UPT P2SKP Pondokdadap (2017)

Jumlah pengguna Kapal Motor dengan ukuran 11-20 GT mendominasi ukuran kapal keseluruhan yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap, Sendangbiru. Untuk Kapal Motor dengan ukuran 11-20 GT nelayan menggunakan alat tangkap Purse Seine dan Pancing Tonda, ukuran < 5 GT nelayan menggunakan alat tangkap Pancing Ulur dengan jenis kapal jukung dan kunting, ukuran 21-30 GT nelayan menggunakan alat tangkap purse seine, sedangkan > 30 GT menggunakan alat tangkap purse seine

4.3.2 Produksi dan Pendaratan Ikan

Pelabuhan Perikanan Pondokdadap merupakan Pelabuhan Perikanan yang memiliki produksi yang baik dimana ikan hasil tangkapan nelayan yang telah di bongkar adalah sebagian besar merupakan ikan pelagis besar yang berkualitas ekspor. Aktivitas bongkar ikan dilakukan pada saat musim ikan sekitar bulan April hingga Desember pada pukul 07.00 hingga 22.00 WIB. Pada tahun 2017 volume produksi yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pondokdadap sebesar 8,444,449 ton dengan nilai Rp. 103.665.767.236. Produksi dan nilai produksi ikan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 12

Tabel 12. Produksi dan Nilai Produksi Ikan Tahun 2017

No	Bulan	Produksi (Kg)	Nilai (Rp)
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	203,839	398,965,056
6	Juni	962,760	23,344,182,550
7	Juli	720,914	12,028,397,700
8	Agustus	1,095,618	19,821,176,000
9	September	1,956,739	25,744,840,400
10	Oktober	2,305,129	22,328,205,530
11	November	986,569	11,142,583,500
12	Desember	212,881	2,795,548,400
	Jumlah	8,444,449	117,603,899,136

Sumber: Laporan Tahunan UPT P2SKP Pondokdadap (2017)

4.4 Kondisi dan Permasalahan di UPT P2SKP Pondokdadap

Beberapa permasalahan teknis yang cukup mendasar selama pelaksanaan program kerja tahun 2017 di UPT P2SKP Pondokdadap adalah sebagai berikut:

1 Produk hukum atau MOU tentang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (1.200 m^2) atau TPI antara pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dan pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tidak ada, padahal aset TPI itu milik Provinsi Jawa Timur dengan demikian menimbulkan ketidakjelasan dalam hal perawatan dan pengembangannya serta tidak adanya komitmen pengelola dalam hal kebersihan dan mekanisme arus ikan di TPI.

2 Kejelasan status tanah dimana status tanah Pelabuhan Perikanan Pondokdadap sangatlah lemah secara administrasi, tanah yang ditempati oleh Pelabuhan Perikanan Pondokdadap masih diklaim milik Perum Perhutani.

3 Adanya intervensi dari pemerintah Desa Tambakrejo dimana kebijakan Pemerintah Desa Tambakrejo masuk kedalam kebijakan penataan Pelabuhan Perikanan yang dilakukan oleh kepala UPT P2SKP Pondokdadap maupun Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sehingga terjadi benturan pengaturan pengelolaan Pelabuhan Perikanan.

4 Kurangnya komunikasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang untuk kemajuan Pelabuhan Perikanan Pondokdadap baik ke UPT P2SKP maupun Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

4.4.1 Penyelesaian Masalah

Penyelesaian masalah atau solusi dalam hal menunjang kelancaran kegiatan operasional di UPT P2SKP Pondokdadap adalah sebagai berikut:

1 Diperlukan pihak ke 3 dalam pemerintah yang terkait dengan pemanfaatan aset dan dasar hukum agar terwujud pengelolaan yang baik atau adanya penyelesaian antara provinsi dan kabupaten untuk melaksanakan kerjasama operasional TPI akan ada kontribusinya sesuai kesepakatan yang dibuat.

2 Pembebasan status lahan dari milik Perum Perhutani ke status tanah hak milik atas nama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dengan demikian kejelasan status akan memberikan dampak kepastian hukum investasi perikanan sehingga akan transaksi jual beli ikan di TPI akan berdampak positif.

3 UPT P2SKP Pondokdadap Malang selalu menerima masukan dari Pemerintah Desa Tambakrejo selama tidak bertentangan dengan Undang – Undang peraturan yang dikeluarkan baik Pusat maupun Daerah dan usulan yang positif guna untuk perbaikan pelayanan Publik.

4 UPT P2SKP Pondokdadap selalu membuka komunikasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang untuk memberikan pelayanan Publik terbaik sehingga bisa tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat perikanan.

4.5 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui strategi yang tepat dalam peningkatan fasilitas yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelabuhan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), sedangkan Faktor eksternal meliputi peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*).

4.5.1 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

Penilaian internal dan eksternal digunakan untuk menganalisis keadaan masalah, kondisi dan potensi yang ada di sekitar UPT P2SKP Pondokdadap. Berikut hasil dari identifikasi faktor internal dan eksternal di UPT P2SKP Pondokdadap yang terdiri dari variable kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

1. Identifikasi Faktor Internal

a. Variabel Kekuatan (*Strength*)

1) Berada di lokasi selatan jawa yang memiliki potensi ikan ekonomis tinggi

Kawasan sendangbiru merupakan salah satu pantai yang prospektif dalam produk perikanan ekonomis penting. Produksi ikan yang didaratkan oleh nelayan sendangbiru sangat berlimpah seperti potensi stok ikan yang salah satunya ikan tuna.

2) Barrier alami (Pulau Sempu)

Terdapatnya barrier alami yaitu pulau sempu merupakan keunggulan lebih UPT P2SKP Pondokdadap. Keunggulan UPT P2SKP Pondokdadap ini memberikan keamanan kepada setiap nelayan ataupun masyarakat sekitar yang melakukan aktifitas di sekitar UPT P2SKP Pondokdadap.

3) Sudah memiliki beberapa fasilitas pokok, fungsional dan penunjang

UPT P2SKP Pondokdadap memiliki fasilitas pelabuhan yang terdiri dari fasilitas pokok, fungsional dan penunjang. Fasilitas pokok yang dimiliki UPT P2SKP Pondokdadap yaitu: dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek, turap dan lahan. Fasilitas fungsional yang dimiliki UPT P2SKP Pondokdadap yaitu: gedung TPI, bengkel kapal, *cold storage,* pasar ikan, gedung transite ikan, tandon air, gedung genset, tempat perbaikan jaring. Fasilitas penunjang yang dimiliki UPT P2SKP Pondokdadap yaitu: kantor administrasi pelabuhan, rumah dinas, pos keamanan, gedung pelayanan baru.

4) Adanya usaha perikanan disekitar UPT P2SKP Pondokdadap

Keadaan usaha perikanan di UPT P2SKP Pondokdadap sangat berkembang. Usaha perikanan di UPT P2SKP meliputi usaha pemindangan ikan, pasar ikan, dan pabrik pengolahan hasil perikanan. Berdasarkan laporan tahunan UPT P2SKP Pondokdadap pada tahun 2017, ada 50 bakul ikan yang masih aktif membeli hasil tangkapan dari pasar lelang dan ada 11 pemilik usaha pengolahan perikanan seperti pemindangan, pembuatan petis dan pengasinan ikan.

5) Keamanan dan kenyamanan di lingkungan UPT P2SKP Pondokdadap

Keamanan dan kenyamanan yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap sudah baik. Koordinasi antara petugas keamanan dengan karyawan maupun masyarakat perikanan terbilang sangat baik, petugas keamanan di UPT P2SKP Pondokdadap telah menjalankan fungsinya dengan optimal untuk menjaga keamanan sekitar UPT P2SKP Pondokdadap.

b. Variabel Kelemahan (*Weakness*)

1) Adanya Illegal Fishing

Salah satu penghambat suatu pelabuhan yaitu adanya kegiatan *illegal fishing*, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan akan menyulitkan otoritas setempat untuk memantau sumberdaya yang telah dieksploitasi oleh nelayan, hal ini sangat merugikan pihak UPT P2SKP Pondokdadap.

2) Keterbatasan air, listrik dan jaringan komunikasi

UPT P2SKP Pondokdadap memiliki keterbatasan air, listrik dan jaring komunikasi, hal ini bisa berdampak pada kenyamanan pegawai yang bekerja atau bermukim di sekitar UPT P2SKP Pondokdadap. Dimana air, listrik maupun jaringan komunikasi sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan kerja dan kebutuhan sehari-hari.

3) Sertifikasi lahan

Hingga saat ini UPT P2SKP Pondokdadap masih belum memiliki sertifikat lahan sendiri, karena letaknya berada di kawasan hutan lindung. Pembagian sertifikasi lahan sebesar 50% pelabuhan dan 50% hutan lindung menyebabkan ada beberapa fasilitas pelabuhan yang belum termasuk dalam lahan yang sudah di sertifikasi lahan tersebut, salah satu fasilitas yang belum memiliki sertifikat adalah dermaga.

4) Luasan lahan yang terbatas

Karena status lahan yang belum memiliki kejelasan, pembangunan dari UPT P2SKP Pondokdadap sangatlah minim. Kawasan yang berada di luar pelabuhan tidak dapat di manfaatkan secara maksimal. Permasalahan sertifikasi lahan yang masih menjadi satu dengan hutan lindung membuat lahan UPT P2SKP Pondokdadap menjadi terbatas dan tidak dapat dikembangkan untuk menunjang aktifitas yang ada di pelabuhan.

5) Keterbatasan SDM

Dalam kegiatan operasional yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap masih adanya keterbatasan SDM. Hal ini perlu ditindak lajuti dengan menambah tenaga kerja dan peningkatan kemampuan tenaga kerja agar dapat menunjang kegiatan operasional yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap untuk lebih baik lagi.

2. Identifikasi Faktor Eksternal

a. Variabel Peluang

1) Pasar domestik dan ekspor sangat terbuka

Daerah pemasaran hasil tangkapan yang berasal dari UPT P2SKP Pondokdadap mencakup pasar domestik dan pasar luar negeri. Tujuan pemasaran ikan UPT P2SKP Pondokdadap mencakup dalam kota, antar kota bahkan sampai dengan antar provinsi. Selain didistribusikan ke pasar domestik hasil tangkapan, hasil tangkapan ini di ekspor ke beberapa negara seperti spanyol, francis dan lain-lain.

2) Ketertarikan investor untuk menanamkan modal

Tingginya volume produksi dan nilai produksi hasil tangkapan ikan yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap menjadi nilai tambah untuk investor. Hasil tangkapan ikan yang di dominasi ikan-ikan ekonomis yang memiliki harga tinggi dipandang menjadi salah satu penyebab banyaknya investor yang ingin menanamkan modal di sektor perikanan tangkap.

3) Menyerap tenaga kerja dan memberikan peluang kesempatan usaha

Kurangnya petugas atau karyawan di UPT P2SKP Pondokdadap menjadi suatu peluang bagi masyarakat perikanan dan lainnya untuk bekerja sama dalam membangun dan mengurus kegiatan perikanan di UPT P2SKP, dengan ini memudahkan UPT P2SKP karena potensi sumberdaya manusianya yang terbilang cukup.

4) Keberadaan ekosistem pesisir dan laut yang alami dan beragam

Sendangbiru terletak di kawasan perairan pesisir selatan Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Pantai Sendangbiru merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi kelautan yang sangat besar baik dari segi kelimpahan biotanya dan sebaran wilayahnya. Letaknya yang berada di sekitar pulau dan di tunjang oleh tiga ekosistem laut yang penting yaitu mangrove, lamun dan terumbu karang membuat tingkat keberagaman ikan yang tinggi di wilayah pesisir Sendangbiru, salah satu potensi pesisir Sendangbiru yang menonjol adalah jenis tuna dan cakalang.

5. Tingginya permintaan pasar akan ikan di UPT P2SKP Pondokdadap

Karena tingginya permintaan pasar akan ikan menjadi peluang UPT P2SKP Pondokdadap untuk mengembangkan sektor perekonomian yang ada disekitar pelabuhan. Untuk itu dibutuhkan juga penanganan ikan yang baik agar kualitas dan mutu ikan yang dihasilkan UPT P2SKP Pondokdadap juga baik.

b. Variabel Ancaman

1) Tumpang tindih kewenangan fasilitas antar instansi

Peraturan tentang pengelolaan fasilitas UPT P2SKP Pondokdadap seperti TPI di antara pihak Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Malang menyebabkan tumpang tindihnya pihak yang berhak mengelola dan mengembangkan TPI. Aset TPI yang mutlak milik Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur menyebabkan ketidakjelasan dalam pengembangan dan perawatan TPI.

2) Merupakan kawasan rawan bencana

Wilayah malang selatan merupakan daerah yang terkena rawan bencana gempa dan tsunami. Karena terletak di bibir Samudera Hindia. Selain itu,

perubahan cuaca yang ekstrim akan berpengaruh kepada nelayan yang melakukan operasional penangkapan ikan.

3) Kemungkinan munculnya konflik kepentingan

Pemangku kepentingan yang ada di daerah Sendangbiru tergolong tinggi karena keikutsertaan pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. Pemangku kepentingan yang dimaksud diantaranya adalah pihak pelabuhan, Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dinas Kelautan Perikanan Provinsi dan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Malang, Koperasi Unit Desa (KUD), Pengusaha, serta Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) setempat. Hal tersebut ditakutkan akan menjadi salah satu penyebab kemungkinan munculnya konflik kepentingan dalam hal pengelolaan sumberdaya ikan.

4) Pencemaran Air (Limbah)

Banyak nelayan ataupun masyarakat sekitar yang tidak peduli akan kebersihan lingkungan UPT P2SKP seperti membuang sampah-sampah perbekalan operasi penangkapan, oli kapal, dan limbah lainnya di kolam pelabuhan, hal ini tentu akan menurunkan kualitas dan mutu hasil tangkapan yang ada dan mengakibatkan pencemaran lingkungan di sekitar UPT P2SKP Pondokdadap.

5) Akses jalan terbatas

Akses jalan untuk menuju ke UPT P2SKP Pondokdadap masih terbatas baik dalam kondisi jalan, rambu-rambu jalan ataupun lampu penerangan jalan pada saat malam hari. Hal ini sangat dikhawatirkan dapat mengakibatkan rawan kecelakaan atau tindak kejahatan.

4.5.2 Matriks SWOT

Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal kemudian digunakan matriks SWOT untuk memperoleh alternatif strategi. Matriks SWOT dapat dilihat pada tabel 13 dibawah ini.

Tabel 13. Matriks SWOT

Intern Factor (IFAS) / **Extern Factor (EFAS)**	**Strength (S)**	**Weakness (W)**
	1. Berada di lokasi selatan jawa yang memiliki potensi ikan ekonomis tinggi. 2. Barrier alami (Pulau Sempu) 3. Sudah memiliki beberapa fasilitas pokok, fungsional dan penunjang. 4. Adanya usaha perikanan di sekitar UPT P2SKP Pondokdadap. 5. Keamanan dan kenyamanan dilingkungan UPT P2SKP Pondokdadap.	1. Adanya illegal fishing. 2. Keterbatasan air, listrik dan jaringan komunikasi. 3. Sertifikasi lahan. 4. Luasan lahan yang terbatas. 5. Keterbatasan SDM.
Opportunities (O) 1. Pasar domestik dan ekspor sangat terbuka. 2. Ketertarikan investor untuk menanamkan modal. 3. Menyerap tenaga kerja dan memberikan peluang kesempatan usaha. 4. Keberadaan ekosistem pesisir dan laut yang alami dan beragam. 5. Tingginya permintaan pasar akan ikan di UPT P2SKP Pondokdadap.	**Strategi (SO)** 1. Menjaga kualitas dan mutu ikan agar nilai ekonomi ikan semakin tinggi sehingga dapat menarik investor (S1,O1,O2,O4,O5). 2. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan usaha perikanan yang didukung dengan adanya fasilitas pelabuhan sehingga dapat membuka peluang kesempatan kerja (S3,S4,O1,O2,O3) 3. Menambah petugas atau tenaga kerja (S4,S5,O3) 4. Menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut (S2,S5,O4)	**Strategi (WO)** 1. Optimalisasi fasilitas yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap (W2, W3,W4,O1,O2,O5) 2. Meningkatkan profesionalitas tenaga kerja di UPT P2SKP Pondokdadap (W5,O3). 3. Penambahan petugas pengawasan ekosistem pesisir dan laut (W1,W5,O4). 4. Peningkatan akses permodalan (W2,W3,W4,O2,O5).
Threaths (T) 1. Tumpang tindih kewenangan fasilitas antar instansi. 2. Merupakan kawasan rawan bencana. 3. Kemungkinan munculnya konflik kepentingan. 4. Pencemaran air (Limbah). 5. Akses jalan terbatas	**Strategi (ST)** 1. Mereduksi dampak kerusakan gelombang besar atau tsunami (S2,T2). 2. Pengadaan penyuluhan mingguan secara rutin guna meningkatkan wawasan kepentingan SDI dan mengelola usaha perikanan (S1,S3,T4) 3. Meningkatkan kebersihan di lingkungan UPT P2SKP Pondokdadap (S4,S5,T4) 4. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder, pemerintah dan instansi terkait (S4,T1,T3,T5)	**Strategi (WT)** 1. Mengadakan penyuluhan tentang illegal fishing dan mengolah limbah pabrik atau rumah tangga serta sisa oli kapal (W1,T4). 2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder, pemerintah dan instansi terkait (W3,W4,T1,T3,T5). 3. Pemeliharaan dan Perbaikan fasilitas operasional yang ada di sekitar UPT P2SKP Pondokdadap (W2,W4,T2). 4. Menambah petugas pengawasan untuk menambahkan tingkat pengawasan ekosistem pesisir dan laut (W1,W5,T4).

4.5.3 Analisis Matriks Grand Strategi

` Matriks grand strategi ditentukan setelah penentuan skor. Skoring faktor digunakan untuk menentukan strategi mana yang akan diambil berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal. Hasil dari skoring faktor ini dapat dilihat pada pada tabel 14 dan 15 di bawah ini.

Tabel 14. Analisis Skoring Faktor Internal

Faktor Strategi Kekuatan (S)	Bobot	Rating	Skor
1. Berada di lokasi selatan jawa yang memiliki potensi ikan ekonomis tinggi.	0,104	3	0,311
2. Barrier alami (Pulau Sempu).	0,101	3	0,304
3. Sudah memiliki beberapa fasilitas pokok, fungsional dan penunjang.	0,099	3	0,298
4. Adanya usaha perikanan di sekitar UPT P2SKP Pondokdadap.	0,096	3	0,289
5. Keamanan dan kenyamanan di lingkungan UPT P2SKP Pondokdadap.	0,107	3	0,322
Jumlah	**0,508**	**15**	**1,524**
Faktor Strategi Kelemahan (W)			
1. Adanya Illegal Fishing.	0,101	3	0,302
2. Keterbatasan air, listrik dan jaringan komunikasi.	0,094	3	0,282
3. Sertifikasi lahan.	0,099	2	0,197
4. Luasan lahan yang terbatas.	0,103	2	0,206
5. Keterbatasan SDM.	0,096	2	0,191
Jumlah	**0,492**	**12**	**1,179**
Total	**1**		

Pada tabel 14 dapat kita ketahui bahwa nilai kekuatan tertinggi adalah variabel keamanan dan kenyamanan di lingkungan UPT P2SKP Pondokdadap (0,322), faktor kekuatan terkecil adalah variabel adanya usaha perikanan di sekitar UPT P2SKP Pondokdadap (0.289). Pada faktor kelemahan tertinggi adalah adanya illegal fishing (0.302), faktor kelemahan terkecil adalah keterbatasan SDM (0.191).

Tabel 15. Analisis Skoring Faktor Eksternal

Faktor Strategi Peluang (O)	Bobot	Rating	Skor
1. Pasar domestik dan ekspor sangat terbuka.	0,106	3	0,319
2. Ketertarikan invenstor untuk menanamkan modal.	0,099	3	0,298
3. Menyerap tenaga kerja dan memberikan peluang kesempatan usaha.	0,103	3	0,308
4. Keberadaan ekosistem pesisir dan laut yang alami dan beragam.	0,092	3	0,277
5. Tingginya permintaan pasar akan ikan di UPT P2SKP Pondokdadap	0,095	3	0,286
Jumlah	**0,496**	**15**	**1,488**
Faktor Strategi Ancaman (T)			
1. Tumpang tindih kewenangan fasilitas antar instansi.	0,100	3	0,300
2. Merupakan kawasan rawan bencana.	0,093	3	0,279
3. Kemungkinan munculnya konflik kepentingan.	0,096	3	0,289
4. Pencemaran air (Limbah).	0,109	2	0,218
5. Akses jalan terbatas.	0,106	2	0,211
Jumlah	**0,504**	**13**	**1,297**
Total	**1**		

Pada tabel 15 dapat kita ketahui pada faktor peluang tertinggi adalah variabel pasar domestik dan ekspor sangat terbuka (0.319), peluang terendah adalah variabel keberadaan ekosistem pesisir dan laut yang alami dan beragam (0.277). Pada faktor ancaman tertinggi adalah variabel tumpang tindih kewenangan fasilitas antar instansi (0.300), ancaman terendah adalah variabel akses jalan terbatas (0.211).

Posisi strategi digunakan untuk menentukan pilihan pada keempat strategi yang telah didapatkan dari hasil analisis matriks SWOT. Cara yang digunakan yaitu menempatkan total skor pada faktor internal dan eksternal. Hasil dari faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang masing-masing dikurangi. Hasil dari masing-masing pengurangan akan dijadikan titik koordinat. Faktor internal yaitu kekuatan (S) dikurangi dengan kelemahan (W) yang nilainya akan dijadikan titik koordinat X. Faktor eksternal yaitu peluang (O) dikurangi dengan ancaman (T) yang nilainya akan dijadikan titik koordinat Y. Penentuan titik koordinat ini untuk mengetahui strategi yang akan digunakan untuk

strategi manajemen UPT P2SKP Pondokdadap. Berikut adalah perhitungan untuk mencari titik koordinat dari sumbu (X) dan sumbu (Y):

X = Kekuatan (S) – Kelemahan (W)

= 1,524 - 1,179

= 0,346

Y = Peluang (O) – Ancaman (T)

= 1,488 - 1,297

= 0,191

Hasil perhitungan diatas diperoleh titik koordinat (0,346 : 0,191). Hal ini menunjukan Matriks Grand Strategi berada pada kuadran I.

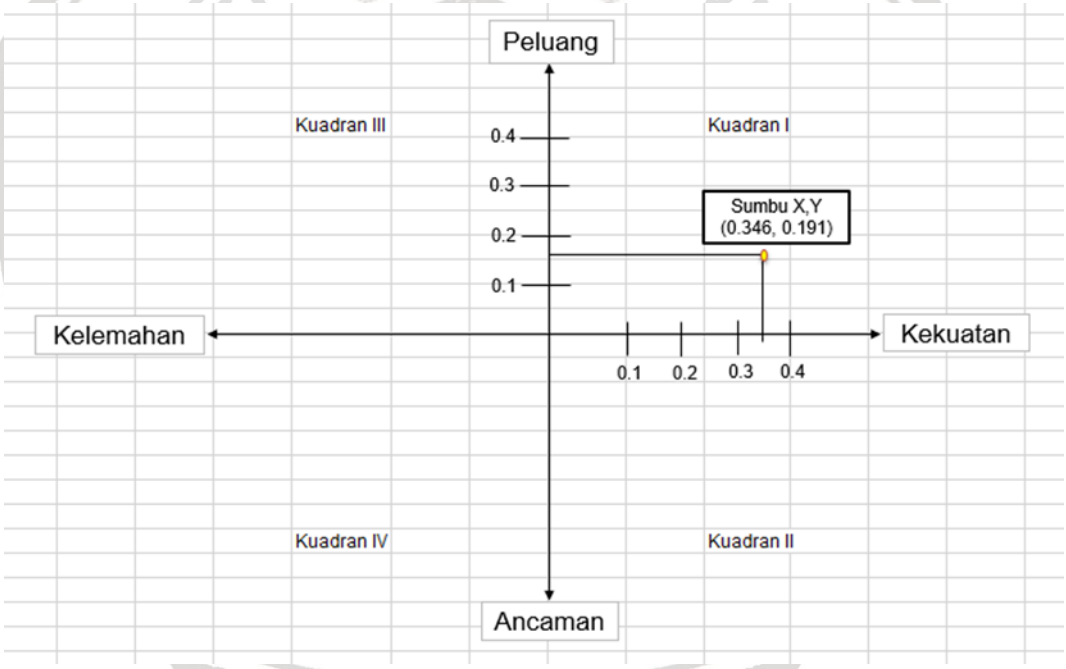

Gambar 3. Matriks Grand Strategi

Hasil yang didapatkan dari analisis Matriks Grand Strategi, UPT P2SKP Pondokdadap berada kuadran 1 yaitu pada kekuatan dan peluang (SO). Situasi ini menggambarkan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap untuk mendapatkan peluang yang sebesar-besarnya.

Strategi yang diterapkan berdasarkan matriks SWOT (Tabel 11) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kualitas dan mutu ikan agar nilai ekonomi ikan semakin tinggi sehingga dapat menarik investor
2. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan usaha perikanan yang didukung dengan adanya fasilitas pelabuhan sehingga dapat membuka peluang kesempatan kerja
3. Menambah petugas atau tenaga kerja
4. Menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut

4.6 Analisis AHP (*Analitycal Hierarchy Process*)

AHP merupakan metode untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menentukan pilihan yang terbaik dari beberapa alternatif yang bisa diambil, dengan kata lain AHP dapat membantu dalam penentuan prioritas strategi manajemen UPT P2SKP Pondokdadap. Aktor yang digunakan dalam AHP terdiri dari masyarakat, pemerintah dan swasta, sedangkan faktor yang digunakan adalah ekonomi, lingkungan dan sosial. Ketiga faktor tersebut didesain berdasarkan strategi kebijakan yang telah dihasilkan dalam analisis SWOT. Strategi kebijakan tersebut adalah:

1) Menjaga kualitas dan mutu ikan agar nilai ekonomi ikan semakin tinggi sehingga dapat menarik investor
2) Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan usaha perikanan yang didukung dengan adanya fasilitas pelabuhan sehingga dapat membuka peluang kesempatan kerja
3) Menambah petugas atau tenaga kerja
4) Menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut

4.6.1 Hubungan Aktor dengan Tujuan Utama

Aktor memiliki peranan penting sebagai penentu dan pelaku utama dalam Strategi Manajemen UPT P2SKP Pondokdadap. Perencanaan tersebut melibatkan tiga aktor yang berpengaruh yaitu masyarakat, pemerintah dan swasta. Berdasarkan hasil analisis AHP dengan menggunakan software *Expert Choise* 11 dari tiga aktor tersebut yang memiliki peran besar yaitu pemerintah (0,443), terbesar kedua yaitu masyarakat (0,387) dan yang ketiga adalah swasta (0,169). *Inconsistency Ratio* (IR) yang didapat adalah sebesar 0,02 (Gambar 4). Hal ini manandakan bahwa dalam pembobotan ketiga aktor tersebut tidak terlalu konsisten, namun karena nilai IR= 0,02 lebih kecil dari 0,1, maka ketidak konsistenan ini masih bisa di terima.

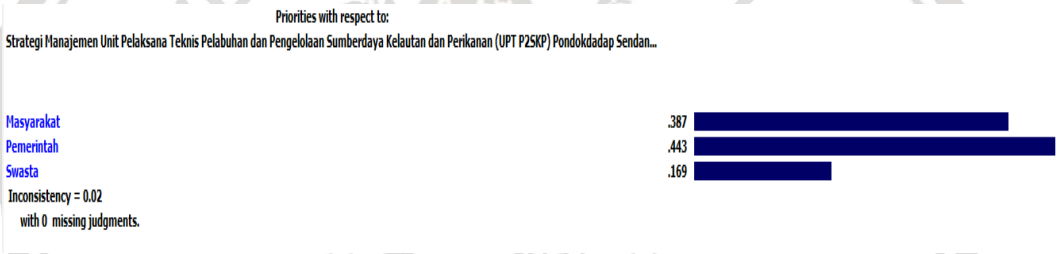

Gambar 4. Analisis Aktor dalam Mencapai Tujuan

Berdasarkan hasil yang didapat pemerintah memiliki peran utama yang sangat penting. Sebagai negara kepulauan peranan pelabuhan sangat vital dalam perekonomian Indonesia, oleh karena itu pemerintah sudah seharusnya mendukung setiap pelabuhan yang ada. Pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pelabuhan. Penyediaan infrastruktur dan pelayanan yang efektif dan efisien adalah salah satu faktor penting untuk memperlancar segala kegiatan yang ada di pelabuhan.

Masyarakat merupakan aktor penting kedua, karena masyarakat yang menjalankan dan menerima dampak dari segala kegiatan dan prioritas ataupun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun kesadaran masyarakat umumnya masyarakat nelayan bisa dikatakan kurang karena masyarakat nelayan

biasanya memiliki Pendidikan yang rendah. Sosialisasi dari pemerintah yang diperuntukkan ke masyarakat nelayan masih sangat diperlukan guna memberi pengarahan dan wawasan kepada masyarakat nelayan.

Swasta memiliki peranan ketiga dalam kegiatan yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap. Hal ini dapat diketahui dari investor-investor yang menanamkan modal disekitar UPT P2SKP Pondokdadap. Penanaman modal ini dapat berupa penyewaan lahan yang dimiliki UPT P2SKP Pondokdadap. Semakin banyak investor yang menyewa lahan UPT P2SKP Pondokdadap, maka semakin bertambah pula pemasukan dana untuk UPT P2SKP Pondokdadap.

4.6.2 Hubungan Faktor dengan Aktor

Faktor-faktor yang terdapat pada strategi manajemen UPT P2SKP Pondokdadap yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Faktor-faktor ini memiliki hubungan dengan ketiga aktor yang mempengaruhi strategi manajemen UPT P2SKP. Nilai hubungan antara faktor dengan aktor dapat dilihat pada tabel 16 dibawah ini.

Tabel 16. Nilai Hubungan Faktor dengan Aktor

Faktor / Aktor	Ekonomi	Sosial	Lingkungan
Masyarakat	0,413	0,260	**0,327**
Pemerintah	0,327	**0,413**	0,260
Swasta	**0,550**	0,210	0,240

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa aktor dan faktor saling mempengaruhi:

1. Faktor ekonomi sangat dipengaruhi oleh swasta (0,550)
2. Faktor sosial sangat dipengaruhi oleh pemerintah (0,413)
3. Faktor lingkungan sangat dipengaruhi oleh masyarakat (0,327)

Aktor masyarakat dapat mempengaruhi faktor lingkungan yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap dengan nilai 0,327. Aktor pemerintah dapat mempengaruhi faktor sosial dengan nilai 0,413, sedangkan aktor swasta mempengaruhi faktor ekonomi yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap dengan nilai 0,550. Pada analisis faktor, untuk ketiga faktor di atas memiliki IR lebih kecil dari 0,1, hal ini menunjukan bahwa ketidak konsistenan dapat diterima. Data *Inconsistency Ratio* untuk masing-masing faktor dan aktor yang berkaitan dapat dilihat pada lampiran 5.

4.6.3 Analisis Kebijakan AHP

Kebijakan yang perlu dilakukan dalam strategi manajemen UPT P2SKP Pondokdadap dengan berdasarkan hasil dari AHP menjelaskan bahwa aktor dengan bobot peran terbesar adalah pemerintah dengan skor tertinggi sebesar 0,443 atau 44,3% (gambar 5). Semakin besar keterlibatan pemerintah dalam strategi manajemen UPT P2SKP Pondokdadap maka akan mudah terciptanya suatu keputusan kebijakan yang diberlakukan agar UPT P2SKP Pondokdadap lebih baik dan berkembang.

Faktor terbesar yang sangat berpengaruh dalam strategi manajemen UPT P2SKP Pondokdadap yaitu faktor ekonomi dengan berdasarkan hasil dari AHP yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi memperoleh skor 0,550. Karena dalam pengelolaan suatu pelabuhan dibutuhkan dana yang cukup besar untuk memperlancar suatu kegiatan yang ada di pelabuhan. Perhitungan AHP untuk menentukan prioritas strategi manajemen sama dengan penentuan aktor maupun faktor, dengan menggunakan sistem berpasangan pada aplikasi *Expert Choise 11*, IR dalam prioritas strategi manajemen UPT P2SKP Pondokdadap ini dapat dilihat pada lampiran 5. Prioritas yang dihasilkan dari analisis AHP adalah:

1. Menjaga kualitas dan mutu ikan agar nilai ekonomi ikan semakin tinggi sehingga dapat menarik investor (35,7%)

Agar kegiatan usaha perikanan terbilang baik dan mendapatkan pendapatan tinggi maka kegiatan produksi dan pemasarannya juga harus baik, untuk itu dibutuhkan kualitas dan mutu ikan yang sangat baik agar nilai ekonomi ikan semakin tinggi. Dengan menjaga kualitas dan mutu ikan, maka ikan yang didaratkan masih dalam keadaan segar, serta harga ikan yang akan diperoleh juga semakin tinggi pendapatan yang diperoleh pun juga semakin besar. Maka dibutuhkan sosialisasi cara penanganan ikan yang baik kepada masyarakat serta memfasilitasi untuk kegiatan hal-hal yang berhubungan dengan penanganan ikan seperti penambahan perlengkapan Laboratorium Mutu Ikan, memberikan *cool box* kepada setiap kapal yang akan melakukan operasi penangkapan ikan, menyediakan keranjang atau tempat yang bersih saat ikan didaratkan, perlakukan pemindahan ikan dari kapal ke keranjang secara baik, kebersihan TPI yang harus selalu diperhatikan serta mengadakan tata tertib untuk nelayannya sendiri sebagai contoh pelarangan mengkonsumsi rokok pada saat penanganan ikan.

2. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan usaha perikanan yang di dukung dengan adanya fasilitas pelabuhan sehingga dapat membuka kesempatan peluang kerja (26,9%)

Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan usaha perikanan dengan memanfaatkan lahan yang ada, melibatkan para pelaku usaha perikanan untuk membuka usaha perikanan disekitaran UPT P2SKP Pondokdadap. Adanya pusat-pusat usaha perikanan dapat meningkatkan perekonomian pelabuhan dikarenakan banyak para investor yang akan menanamkan modalnya untuk kegiatan perikanan seperti pasar ikan, kegiatan pengolahan ikan sampai dengan pendistribusian ikan bahkan sampai kegiatan ekspor-impor ikan. Dengan itu banyak juga nelayan dan pelaku perikanan lain yang akan ikut serta dalam

kegiatan-kegiatan perikanan yang menunjang perekonomian pelabuhan. Oleh karena itu, akan semakin banyak peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar di UPT P2SKP Pondokdadap.

3. Menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut (20,6%)

Menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut sebagai salah satu bentuk usaha untuk mempertahankan keberlanjutan sumberdaya ikan. Eksositem sebagai salah satu faktor lingkungan yang penting untuk sumberdaya ikan harus di lindungi untuk mempertahankan keberagaman sumberdaya. Sendangbiru yang terletak di pesisir pantai dan memiliki tiga ekosistem laut tropis penting yaitu mangrove, lamun dan terumbu karang pun harus selalu terjaga kelestariannya. Kegiatan untuk menjaga kelestarian ini dapat tercapai dengan kerjasama berbagai pihak stakeholder terkait seperti pemerintah, nelayan hingga masyarakat yang di wakilkan oleh Pokmaswas, pelestarian yang di maskud dapat dalam bentuk konservasi atau pelestarian lainnya. Luaran yang di harapkan dari pelestarian ini adalah terjaganya sumberdaya ikan dalam hal jumlah dan keberagaman, selain itu manfaat lainnya adalah keindahan alam pesisir laut yang terjaga dapat menjadi daya Tarik tersendiri untuk para investor serta wisatawan.

4. Menambah petugas atau tenaga kerja (16,8%)

Penambahan tenaga kerja di UPT P2SKP Pondokdadap adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pelayanan pelabuhan kepada masyarakat perikanan. Untuk melakukan fungsi pelabuhan yang tertera di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012, tentunya diperlukan sumberdaya petugas yang banyak dan mumpuni. Kuantitas petugas tentunya sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi kerja di pelabuhan itu sendiri, dan kualitas tenaga kerjapun sama pentingnya dengan kuantitas. Penambahan dan pengembangan kualitas tenaga kerja akan menjadi faktor penting yang diharapkan dapat memaksimalkan tugas dan fungsi pelabuhan.

IR yang dihasilkan dari analisis faktor dengan kebijakan adalah kurang dari 0,1 maka IR dapat diterima. Hasil analisis strategi manajemen UPT P2SKP Pondokdadap yang diperoleh dari AHP pada *Expert Choise 11*, disajikan pada gambar 5.

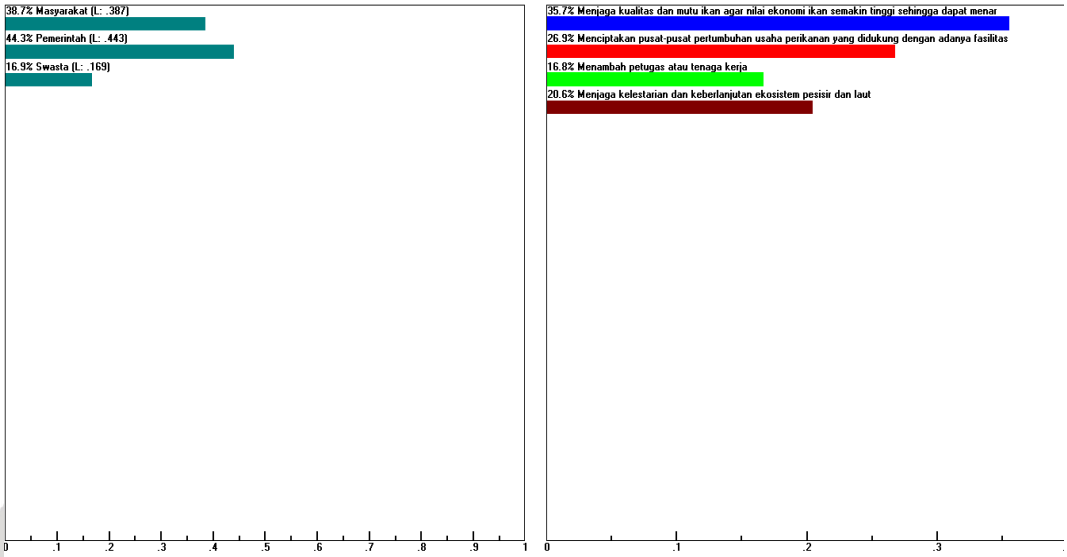

Gambar 5. Hasil Analisis Sensitivitas (Aktor dan Faktor)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Isu dan permasalahan yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap adalah produk hukum atau MOU tentang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (1.200 m^2/TPI antara pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dan pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tidak ada, kejelasan status tanah dimana status tanah Pelabuhan Perikanan Pondokdadap sangatlah lemah secara administrasi, adanya intervensi dari pemerintah Desa Tambakrejo dimana kebijakan Pemerintah Desa Tambakrejo masuk kedalam kebijakan penataan Pelabuhan Perikanan, kurangnya komunikasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang untuk kemajuan Pelabuhan Perikanan Pondokdadap baik ke UPT P2SKP Pondokdadap maupun Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.
2. Hasil analisis SWOT menunjukan bahwa rumusan strategi manajemen yang harus dilakukan oleh UPT P2SKP Pondokdadap adalah strategi S-O (*Strength-Opportunity*). Strategi S-O merupakan strategi yang menggambarkan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap untuk mendapatkan peluang yang sebesar-besarnya. Strategi S-O disini yaitu menjaga kualitas dan mutu ikan agar nilai ekonomi ikan semakin tinggi sehingga dapat menarik investor, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan usaha yang didukung dengan adanya fasilitas pelabuhan sehingga dapat membuka kesempatan peluang kerja, menambah petugas atau tenaga kereja, menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut.
3. Arahan kebijakan yang diprioritaskan untuk manajemen UPT P2SKP Pondokdadap berdasarkan analisis AHP adalah menjaga kualitas dan mutu

ikan agar nilai ekonomi ikan semakin tinggi sehingga dapat menarik investor (35,7%), menciptakan pusat-pusat pertumbuhan usaha perikanan yang didukung dengan adanya fasilitas pelabuhan sehingga dapat membuka kesempatan peluang kerja (26,9%), menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut (20,6%), menambah petugas atau tenaga kerja (16,8%), sedangkan pihak yang berprioritas untuk pelabuhan yaitu pemerintah (44,3%), masyarakat (38,7%) dan swasta (16,9%)

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah:

1. Adanya penelitian lanjutan tentang strategi manajemen UPT P2SKP Pondokdadap sehingga fungsi pelabuhan dapat di optimalkan.
2. Diperlukannya peningkatan sumberdaya tenaga kerja dengan meningkatkan kinerjanya dan penambahan tenaga kerja ahli sehingga dalam menjalankan kegiatan dan pelayanan pelabuhan lebih efektif.
3. Perlunya penerapan strategi manajemen dengan menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh UPT P2SKP Pondokdadap.

repository.ub.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Atharis, Y. 2008. Tingkat Kepuasan Nelayan terhadap Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Melaut di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus Sumatera Barat. Bogor. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

Fitriyani dan Helmud, E. 2016. Pemilihan Paket Internet Android Pada Operator Telepon GSM Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). STMIKK Atma Luhur Pangkalpinang. Jurnal Sistem Informasi, Vol. 8. No. 1.

Ginting, R. F. 2011. Kondisi dan Potensi Pengembangan Kepelabuhan Perikanan di Kabupaten subang. Bogor. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Hamali, S. 2015. Pengambilan Keputusan Manajemen Menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Universitas Bina Nusantara.

Hutapea, R. Y. F. 2017. Peran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Dalam Mendukung Industri Perikanan Tuna. Bogor. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.

Juwono, O. 2012. Analisis Manajemen Strategik Perusahaan Waralaba (*Franchise*), Studi Kasus di Restoran Cepat Saji McDonald's. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Jakarta. Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 1: 1.

Kresnanto, J. N. 2004. Analisis kinerja dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan di Kota Pekalongan. Semarang: Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.

Muljono, M. D. S. 2005. Manajemen Pengembangan PPI Banyutowo Dalam Upaya Meningkatkan PAD Kabupaten Pati. Semarang. Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.

Ningsih, T. 2006. Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Bogor. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan.

Putra, A. F. E. 2016. Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Salak Pada UMKM Azizah Di Kabupaten Banjarnegara. Bogor. Departemen Agribisnis. Fakultas Ekonomi Dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Rangkuti, F. 2004. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta. PT Gramedia Pusaka Utama.

Sharif, A. 2015. Strategi Optimasi Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Jabar Banten Syariah. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.

Sholihin, U. 2014. Analisis Strategi Pemasaran dalam Menghadapi Persaingan Usaha pada Perusahaan Kain dan Sarung Tenun Ikat Cap Sinar Barokah Kediri. *Jurnal Cendekia*, Vol 12 No 3.

Subandi. 2011. Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukkan. Institut Seni Indonesia Surakarta. Surakarta. *Jurnal Harmonia, Volume 11, no. 2.*

Surjani, P Rina. 2002. Manajemen Strategi Dalam Menghadapi Era Globalisasi. Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Vol 11: 1.

Susila, Wayan R, dan Munadi Ernawati. 2007. Penggunaan *Analytical Hierarchy Process* Untuk Penyusunan Prioritas Proposal Penelitian.

Sutiyono. 2013. Metode Penelitian *Survey* dan Korelasional. SD 3 Karangmalang. Jawa Tengah.

Taufiqurokhman. 2016. Manajemen Strategik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama. Jakarta.

Wibowo, B. A., Boesono, H dan Aditomo, A. B. 2012. Analisis Kebijakan Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Nelayan Karimun Jawa Kabupaten Jepara. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Diponegoro. Jurnal Saintek Perikanan Vol. 8. No. 1.

Zakiyah, N. 2008. Dampak Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan Sadeng Kabupaten Gunungkidul Terhadap Pengembangan Perekonomian Masyarakat. Institut Teknologi Bandung.